

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Bagir manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2003, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Fence M. Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Cepat)*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York
- Inu Kencana Syafii, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta
- Ni"matul Huda, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusamedia, Bandung
- Nurmi Chatim, 2006, *Hukum Tata Negara*, Cendikia Insani, Pekanbaru
- Putera Astomo, 2018, *Ilmu Perundang-Undangan, teori dan praktik di Indonesia*, Raja Garfindo, Persada, Depok
- Rosjudu Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Manju, Bandung
- Setya Retnami. 2001, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta, Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 2008, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Universitas Indonesia Press, Jakarta

Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Yando Zakaria, *Makna Mandemen Pasal 18 UUD 1945 Bagi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia*, Yayasan Pusaka, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2022 Tentang Sumatera Barat

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentan Desa

Undang-Undang No. 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang No.

19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Dearah-daerah Swatara Tingkat

1 Sumatera Barat, Jambi, Riau

C. Jurnal

Ferry Irawan Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Perspektif, Volume XXI, Nomor.3, September 2016

Danang Risdiarto, *Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum (Minority Group protection in Indonesia to Realize Justice and Equality Before the law)*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 6, Nomor 1, April 2017

Ni Nyoman Asti Irawati Puja, *Pemenuhan Asas Formil dan Asas Materil dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Menggunakan Metode Omnibus Law*. Jurnal Dinamika Hukum, Volume 24, Nomor 1 April 2023

Fakultas Hukum Universitas Andalas, "Jurnal Hukum" Lex Generalis, Vol.3, No 10, Oktober 2022

Andress D Bakarbesy, Logika Jurnal Ilmu pengetahuan dan Teknologi, *Realitas pelaksanaan desentralisasi di Indonesia*, Vol 9 No 1 Mei 2011

Julita Melissa Walukow, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law bagi Narapidana di dalam Lembaga Permasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Lex et Societas, Vol.1, No.1 2013

Asrinaldi, *Problems with the implementasi of adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Philosophy, Kebudayaan dan Politik*, Vol.33, No.2, 2020

D. Website

Rus Akbar Saleleubaja dan Ocha Mariadi, *Usulan Sumbar Menjadi DIM, ini Kata Sejumla Toko dari Mentawai*, diakses dari [https:// www.mentawaikita. com/baca /5216/usulan-sumbar-](https://www.mentawaikita.com/baca/5216/usulan-sumbar-),

Rus Akbar Saleleubaja dan Ocha Mariadi, *Usulan Sumbar Menjadi DIM, ini Kata Sejumla Toko dari Mentawai*, diakses dari [https://www.mentawaikita.c om/baca/5216/usulan-sumbar-](https://www.mentawaikita.com/baca/5216/usulan-sumbar-),

Setya Retnami. 2001, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta

